

# LKjIP 2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MOJOKERTO



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja  
Akuntabilitas

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya semata, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP ini merupakan laporan kinerja tahunan yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Bupati yang didalamnya memuat unsur-unsur Rencana Strategis dan evaluasi serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (Renstra).

Semoga LKjIP ini dapat menjadi evaluasi guna peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Sumbang saran dan koreksi dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan guna perbaikan laporan ini.

Mojokerto, Februari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO



**RINALDI RIZAL SABIRIN, ST., M.BA.**

Pembina

NIP. 19791010 200901 1 011

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
C. Struktur Organisasi .....	4
D. Maksud dan Tujuan .....	6
E. Permasalahan Utama .....	6
yang dihadapi	
F. Metode Penyusunan .....	8
G. Sistematika Penyajian .....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. Rencana Strategis .....	11
B. Strategi .....	14
C. Program .....	17
D. Perjanjian .....	19
Kinerja	
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. Capaian Kinerja .....	23
Organisasi	
B. Realisasi Anggaran .....	89
C. Prestasi .....	97
BAB IV. PENUTUP .....	98
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Daftar Paket Pekerjaan Tahun 2021 pendukung capaian kinerja organisasi tahun 2021	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi selalu berusaha meningkatkan kinerja secara professional dan proporsional, sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yang telah ditetapkan. Dalam Tahun 2021, secara umum dapat mewujudkan 8 (delapan) sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra yaitu : (1) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur ke-PU-an sesuai dengan tata ruang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, (2) Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air, (3) Meningkatkan kondisi mantap jalan kabupaten, (4) Menurunkan kondisi rusak jalan dan jembatan kabupaten, (5) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi, (6) Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung instansi pemerintah, (7) Meningkatkan ketersediaan LPJU dan Trotoar di Wilayah Perkotaan sesuai dengan kewenangannya, (8) Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang.

Dari 8 (delapan) sasaran tersebut telah ditetapkan 9(sembilan) indikator kinerja. 9 Indikator Kinerja tersebut memiliki capaian kinerja sangat berhasil dalam memenuhi target yang ditetapkan.

Tahun 2021 alokasi belanja seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto bersumber dari APBD Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 244.524.480.964,00 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 77.310.569.124,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 167.213.911.840,00. Dari alokasi belanja seluruh kegiatan tersebut, anggaran yang terserap sebesar Rp. 197.366.489.311,72 atau 80,71 % dari total anggaran SKPD.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat meminimalkan hambatan yang ada. Ke depan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto selalu berusaha meningkatkan kinerja dengan lebih mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana yang dimiliki.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja diantaranya kerjasama yang baik antar pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, sarana yang cukup memadai,

kemauan yang tinggi dari pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya serta dukungan dan motivasi yang diberikan pimpinan.

## A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan infrastruktur merupakan urat nadi dalam kelancaran hubungan sosial ekonomi masyarakat yang mempunyai peran mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Infrastruktur merupakan komponen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang terus-menerus dan berkesinambungan mampu memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan nasional dan daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu " ***Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan***" ditetapkan beberapa Misi Kabupaten Mojokerto yang terurai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata.
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menmbuh kembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berdasarkan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah mewujudkan misi ke 3 yaitu *“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata”* melalui penetapan indikator kinerja utama yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RENSTRA dan RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang kemudian diturunkan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2021, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dimaksudkan sebagai pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance* dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### **1. Kedudukan**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana urusan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Tugas Pokok**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati Mojokerto dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

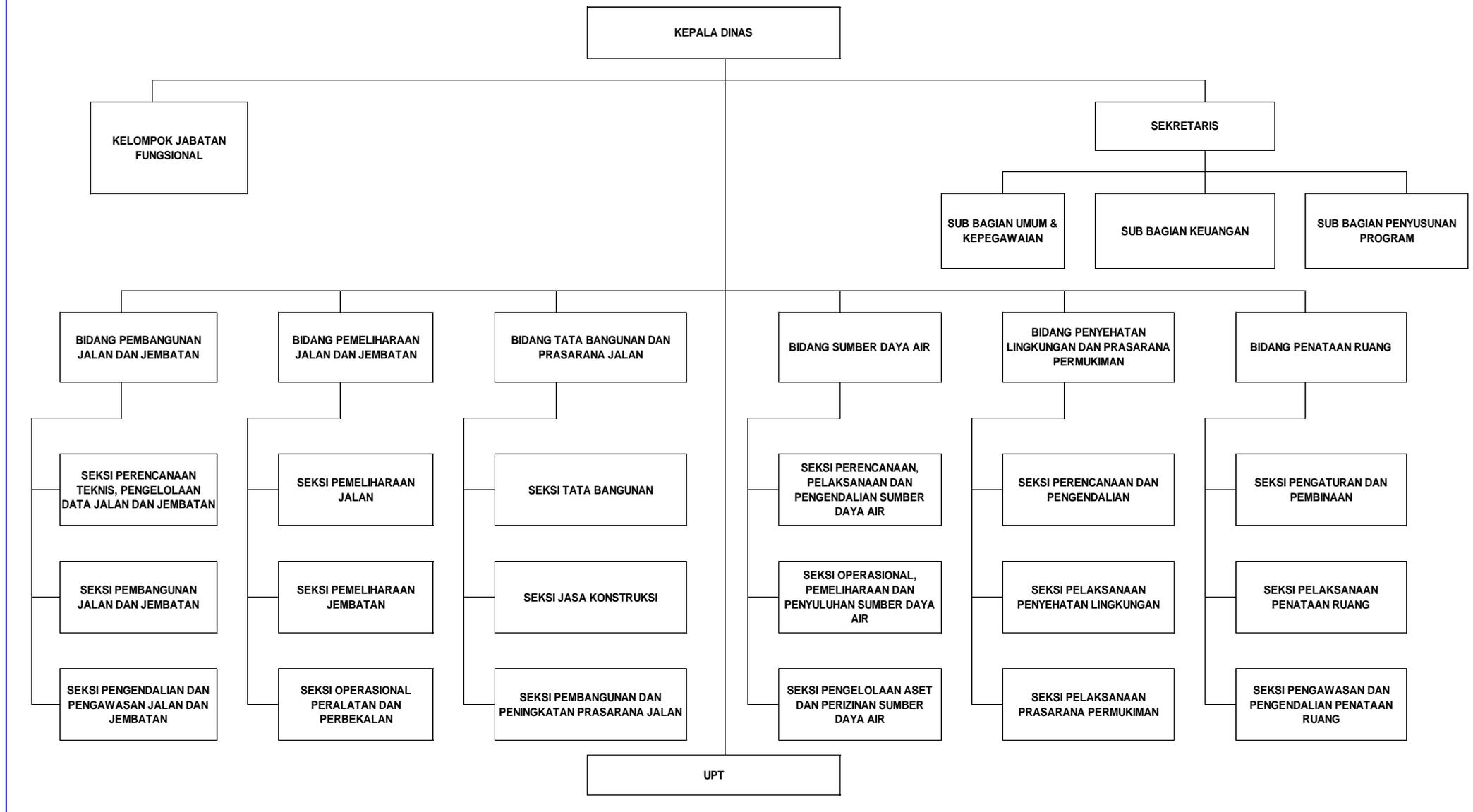
Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### **C. Struktur Organisasi**

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MOJOKERTO



## D. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang telah dilakukan dan telah dicapai sesuai Renstra Tahun 2016-2021 dan Perubahannya serta pencapaian target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan;
2. Sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sehingga lebih efektif;
4. Dapat menginovasi kinerja dan berkompetisi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## E. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Tugas utama yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Infrastruktur. Dalam pelaksanaan tugas utama yang diemban tentu ada permasalahan – permasalahan yang timbul baik dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Identifikasi Permasalahan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto**

Aspek Kajian	Acuan / Kondisi	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal ( Kewenangan SKPD )	Eksternal ( Diluar Kewenangan SKPD )	
Adanya Kerusakan Jalan dan Jembatan Kategori	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permukaan jalan aus, retak –retak dan lubang kecil</li><li>• Sayap</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kondisi jalan yang baik</li><li>• Kondisi</li></ul>	Dana untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tersedia tetapi tidak	Bencana alam	Tidak meratanya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

Rusak Ringan	jembatan tergerus oleh air	jembatan yang utuh	mencukupi untuk penanganan secara keseluruhan		
Adanya Kerusakan Jalan dan Jembatan Kategori Rusak Berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelupasnya permukaan perkerasan jalan</li> <li>Tergerusnya lantai, land hope jembatan dan kerusakan plat jembatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi jalan yang baik</li> <li>Kondisi jembatan yang utuh</li> </ul>	Dana untuk pemeliharaan berkala jalan dan jembatan tidak mencukupi untuk keseluruhan sehingga dilakukan Prioritas Penanganan	Bencana alam	Dana yang tersedia tidak mencakup untuk keseluruhan jalan dan jembatan
Kapasitas Jalan dan Jembatan yang Tidak Memenuhi Syarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan dan jembatan kurang lebar</li> <li>Konstruksi jalan dan jembatan yang tidak sesuai kelas jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lebar jalan dan jembatan sesuai dengan LHR nya</li> <li>Konstruksi jalan dan jembatan sesuai dengan kelasnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebutuhan pendanaan yang terlalu besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume lalu lintas yang tinggi</li> <li>Tonase kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dan jembatan</li> </ul>	Tidak seimbang antara besarnya anggaran dengan kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan
Peralihan fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lahan yang sebelumnya menjadi basis pertanian berubah fungsi menjadi perumahan dan insdustri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debit air yang dapat ditampung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum berjalannya PERDA RTRW terkait fungsi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran masyarakat akan pentingnya lahan pertanian sebagai basis penampung air irigasi</li> </ul>	Pembagian wewenang antara pemkab, pemprov dan pusat
Jalur perpipaan di wilayah pegunungan yang sulit untuk dijangkau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan jaringan pipa untuk SPAM terkendala lokasi yang sulit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan SPAM yang mudah dipantau dan diakses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggaran tersedia dari pusat tetapi dalam pelaksanaan terkendala lokasi yang sulit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bencana alam</li> </ul>	Lemahnya pantauan terhadap jaringan SPAM karena langsung diserahkan kepada masyarakat
Belum disahkannya PERDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak semua pembanguna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan Gedung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOTK tentang Bangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bencana alam</li> </ul>	Dasar penentuan HSPK

tentang Bangunan Gedung	n Gedung Instansi menjadi tanggung jawab DPUPR	tahan Gempa	Gedung belum jelas kewenangannya		menjadi tidak seragam
jaringan drainase yang dimiliki kabupaten	• Setiap jalan seharusnya terdapat drainase	• Setiap jalan seharusnya terdapat drainase yang baik	• Prioritas pembangunan jaringan drainase belum dapat dipastikan		Kewenangan drainase yang ditangani belum diatur secara rinci melalui peraturan daerah ataupun keputusan bupati
Kebutuhan LPJU untuk melayani seluruh wilayah kabupaten	• Belum adanya masterplan LPJU	• Total Kebutuhan LPJU di kabupaten	• Personil teknis LPJU yang kurang	• Pemantauan LPJU dititikberatkan pada laporan masyarakat	Kesulitan pemantauan kondisi LPJU yang tersebar di wilayah kabupaten
PERDA RDTR	• SOP yang ada kurang rinci	• Perlu disusun Rencana Detil Tata Ruang sebagai penjabaran atas RTRW kabupaten	• Kosongnya 1 jabatan eselon IV	• Tumpang tindih kewenangan (BAPPEDA dan BPN)	Kurangnya Personil dan Kejelasan SOP dalam Bidang Penataan Ruang

## F. Metode Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;

1. Mengumpulkan data-data kinerja yang relevan untuk bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021
2. Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebagai bahan untuk menyusun Matriks Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

3. Menyusun narasi analisis tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto menurut program/kegiatan
4. Membandingkan capaian kinerja tahun 2021 dengan target tahun 2021 dan capaian-capaian kinerja tahun sebelumnya (2020) serta menganalisis sebab-sebab terjadinya perbedaan yang signifikan

## **G. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan mengacu pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang dan aspek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto;
- Bab II. Perencanaan Kinerja, menjelaskan berbagai kebijakan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dan rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto untuk periode Tahun 2016 - 2021 dan penetapan kinerja untuk Tahun 2021;
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021;
- Bab IV. Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Lampiran. Pada lampiran menjelaskan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

---

### A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Perangkat Daerah dibuat dengan mengakomodir visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi Kepala Daerah terpilih untuk periode 2016 – 2021 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 beserta Perubahannya, yaitu **”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”** dan Misi Kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawah melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata.
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menmbuh kembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi

kreatifitas serta inovasi masyarakat berdasarkan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang muda dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

Misi yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto adalah **Misi 3** yaitu **"Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata"**

Dalam menentukan perencanaan kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mengacu rencana strategis dan berdasar pada tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yakni :

**TUJUAN :**

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur ke-PU-an sesuai dengan tata ruang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi;  
Dengan indikator : Persentase Infrastruktur ke-PU-an Kondisi Baik sesuai rencana tata ruang

**SASARAN :**

1. Untuk mencapai tujuan " Meningkatnya Kualitas Infrastruktur ke-PU-an sesuai dengan tata ruang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi ", maka ditetapkan sasaran :
  - a. Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air;

Dengan indikator :

1. Persentase infrastruktur SDA Meningkatkan Kualitasnya;

b. Meningkatkan kondisi mantap jalan kabupaten;

Dengan indikator :

2. Persentase jalan kabupaten kondisi mantap;

c. Menurunkan kondisi rusak jalan dan jembatan kabupaten;

Dengan indikator :

3. Persentase penurunan kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;

d. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

Dengan indikator :

4. Persentase penyediaan infrastruktur air minum;

5. Persentase penyediaan infrastruktur sanitasi;

e. Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung instansi pemerintah.

Dengan indikator :

6. Persentase bangunan gedung instansi pemerintah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

f. Meningkatkan ketersediaan LPJU dan Trotoar di Wilayah Perkotaan sesuai dengan kewenangannya.

Dengan indikator :

7. Persentase penyediaan LPJU dan trotoar di wilayah perkotaan yang sesuai dengan kewenangannya;

g. Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang.

Dengan indikator :

8. Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang;

## B. STRATEGI

Untuk mencapai sasaran dalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Ruang Kabupaten Mojokerto diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat dijabarkan dalam suatu kebijakan sebagai berikut :

### Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan setelah Perubahan RPJMD (Periode 2020-2021)

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan		
MISI III	: Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustry, dan pariwisata		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur ke-PU-an sesuai dengan tata ruang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air	Meningkatkan kualitas Infrastruktur Irigasi	Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi melalui kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan
		Mempertahankan ketersediaan air irigasi terutama pada saat musim kemarau	Peningkatan Kualitas Embung/Bendung/Waduk melalui kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan
		Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Peningkatan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP 3A
	Meningkatkan kondisi mantap jalan kabupaten	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta prasarana pelengkapannya	- Peningkatan kualitas struktur jalan/jembatan - Pelebaran Ruas Jalan/Jembatan - Peningkatan Kelas Jalan - Peningkatan

			kualitas bahan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan
	Menurunkan kondisi rusak jalan dan jembatan kabupaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeliharaan jalan dan jembatan kondisi rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan dengan kondisi rusak</li> <li>- Penyediaan alat-alat penunjang ke-PU-an</li> <li>- Peningkatan kapasitas UTC</li> </ul>
	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi	Meningkatkan penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum melalui penyediaan infrastruktur air minum</li> <li>- Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi melalui penyediaan infrastruktur sanitasi</li> <li>- Peningkatan ketersediaan dokumen dasar dan pendukung infrastruktur air minum dan sanitasi</li> </ul>
	Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung instansi pemerintah	Meningkatkan kuantitas bangunan gedung instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas gedung instansi pemerintah</li> <li>- Mendorong percepatan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung</li> <li>- Pendataan Bangunan Gedung instansi pemerintah yang sudah atau belum memenuhi</li> </ul>

			<p>persyaratan administratif dan teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong percepatan pelaksanaan persyaratan tata bangunan dengan RTBL yang sudah ada</li> </ul>
	<p>Meningkatkan ketersediaan LPJU dan Trotoar di Wilayah Perkotaan sesuai dengan kewenangannya</p> <p>Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang</p>	<p>Meningkatkan penyediaan LPJU dan trotoar di wilayah perkotaan</p> <p>Meningkatkan kualitas informasi dan ketersediaan dokumen rencana tata ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pemasangan LPJU</li> <li>- Peningkatan kapasitas LPJU yang dipelihara</li> <li>- Peningkatan LPJU yang termeterisasi</li> <li>- Peningkatan Penyediaan Trotoar di wilayah perkotaan</li> <li>- Mendorong percepatan PERDA RDTR</li> <li>- Mengintenskan koordinasi TKPRD</li> <li>- Mempermudah akses informasi Tata Ruang melalui penggunaan Teknologi Informasi</li> </ul>

## C. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 terinci sebagai berikut :

### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan – kegiatan dari program ini yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan dari program ini yaitu Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota berupa Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Survei Kondisi Jalan/Jembatan, Pelebaran Jalan Menuju Standar, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Pembangunan Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan.

### 3. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan – kegiatan dari program ini yaitu (1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya dan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota. (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

### 4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Kegiatan dari program ini yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota berupa

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat, dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Kegiatan dari program ini yaitu Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota berupa Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Kegiatan dari program ini yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.

7. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Kegiatan dari program ini yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.

8. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Kegiatan pada program ini yaitu (1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota berupa Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota dan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang. (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota berupa Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

9. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Kegiatan dari program ini yaitu Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung berupa Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

#### 10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Kegiatan dari program ini yaitu (1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi berupa Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi. (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota berupa Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI dan Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha.

#### 11. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan dari program ini yaitu Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

#### 12. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kegiatan untuk PAD diperoleh dari hasil retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa alat berat, sewa alat laboratorium dan hasil penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan berupa penjualan hasil penebangan pohon.

### D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi perjanjian kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

**Tabel Lampiran Perjanjian Kinerja  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto  
Tahun 2021**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MOJOKERTO**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	-2	(3)	(4)

1	Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air	Persentase infrastruktur SDA meningkat kualitasnya	78,00%
2	Meningkatkan kondisi mantap jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	75,49%
3	Menurunkan kondisi rusak jalan dan jembatan kabupaten	Persentase penurunan kerusakan jalan dan jembatan kabupaten	15,55 % (Jalan) 42,57 % (Jembatan)
4	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi	Persentase penyediaan infrastruktur air minum	100,00%
		Persentase penyediaan infrastruktur sanitasi	100,00%
5	Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung instansi pemerintah	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis	96,50%
6	Meningkatkan ketersediaan LPJU dan Trotoar di Wilayah Perkotaan sesuai dengan kewenangannya	Persentase penyediaan LPJU dan trotoar di wilayah perkotaan yang sesuai dengan kewenangannya	98 % (LPJU) 42 % (Trotoar)
7	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang	100,00%

No	Program	Anggaran		Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	30.893.377.967,00	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	11.383.088.000,00	APBD
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	5.962.430.000,00	APBD
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp.	1.405.500.000,00	APBD
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	2.127.342.000,00	APBD
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Rp.	31.900.000.000,00	APBD

	Drainase			
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	12.747.000.000,00	APBD
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	134.084.492.968,00	APBD
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	500.000.000,00	APBD
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	1.450.000.000,00	APBD
11	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLA)	Rp.	2.735.000.000,00	APBD
<b>Total Anggaran Tahun 2021</b>		Rp.	<b>235.188.230.935,00</b>	

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MOJOKERTO**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	-2	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur ke-PU-an sesuai dengan tata ruang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Persentase Infrastruktur ke-PU-an Kondisi Baik sesuai rencana tata ruang	75%
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air	Persentase infrastruktur SDA meningkat kualitasnya	78,00%
3	Meningkatkan kondisi mantap jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	75,49%
4	Menurunkan kondisi rusak jalan dan jembatan kabupaten	Persentase penurunan kerusakan jalan dan jembatan kabupaten	15,55 % (Jalan) 42,57 % (Jembatan)
5	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi	Persentase penyediaan infrastruktur air minum	100,00%
		Persentase penyediaan infrastruktur sanitasi	100,00%
6	Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung instansi pemerintah	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis	96,50%

7	Meningkatkan ketersediaan LPJU dan Trotoar di Wilayah Perkotaan sesuai dengan kewenangannya	Persentase penyediaan LPJU dan trotoar di wilayah perkotaan yang sesuai dengan kewenangannya	98 % (LPJU) 42 % (Trotoar)
8	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang	100,00%

No	Program	Anggaran		Ket.
		Rp.		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	30.893.377.967,00	PAPBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	11.383.088.000,00	PAPBD
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	5.962.430.000,00	PAPBD
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp.	1.405.500.000,00	PAPBD
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	2.127.342.000,00	PAPBD
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	31.900.000.000,00	PAPBD
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	12.747.000.000,00	PAPBD
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	134.084.492.968,00	PAPBD
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	500.000.000,00	PAPBD
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	1.450.000.000,00	PAPBD
11	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLA)	Rp.	2.735.000.000,00	PAPBD

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasi dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : kegiatan, rupiah, lokasi dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

**Tabel Target dan Realisasi Capaian Kinerja  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto  
Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA 2021
1	2	3	4	5

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur ke-PU-an sesuai dengan tata ruang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Persentase Infrastruktur ke-PU-an Kondisi Baik sesuai rencana tata ruang	75.00%	75.71%	100.95 %
Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air	Persentase infrastruktur SDA meningkat kualitasnya	78.00%	75.00%	96.15%
Meningkatkan kondisi mantap jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	75.49%	87.23%	115.55 %
Menurunkan kondisi rusak jalan dan jembatan kabupaten	Persentase penurunan kerusakan jalan dan jembatan kabupaten	15.55%	15.46%	99.42%
		42.57%	42.28%	99.32%
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi	Persentase penyediaan infrastruktur air minum	100.00 %	95.95%	95.95%
	Persentase penyediaan infrastruktur sanitasi	100.00 %	87.68%	87.68%
Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung instansi pemerintah	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis	96,5%	96.00%	99.48%
Meningkatkan ketersediaan LPJU dan Trotoar di Wilayah Perkotaan sesuai dengan kewenangannya	Persentase penyediaan LPJU dan trotoar di wilayah perkotaan yang sesuai dengan kewenangannya	98.00%	86.87%	88.64%
		42.00%	15.96%	38.00%
Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang	100.00 %	100.00%	100.00 %

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja digambarkan dengan capaian sasaran indikator kinerja dari tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja  
serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa  
tahun terakhir  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto  
Tahun 2021**

No.	INDIKATOR KINERJA	% Capaian 2017	% Capaian 2018	% Capaian 2019	% Capaian 2020	% Capaian 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase ketersediaan air irigasi	70,00%	70,00%	75,00%		
2	Persentase jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya kondisi baik	76,98%	89,86%	90,96%		
3	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	72,41 % (750 km)	73,99 % (770,477 km)	72,66 % (757,178 km)		
4	Rasio cakupan layanan PJU di kabupaten Mojokerto	68,62%	83,06%	86,67 % (1:57,69 m)		
5	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	0,00%	100,00%	100,00%		
6	Persentase prasarana lingkungan permukiman berkualitas di tiap-tiap kecamatan	65,96%	67,95%	71,98%		
7	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik	95,5 % (191 Gedung)	96,5 % (193 Gedung)	97,5 % (195 Gedung)		

No.	INDIKATOR KINERJA	% Capaian 2020	% Capaian 2021
1	2	6	7
1	Persentase infrastruktur SDA meningkat kualitasnya	75,00%	75,00%
2	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	80,16%	87,23%

3	Persentase penurunan kerusakan jalan dan jembatan kabupaten	19.39 % (Jalan)	15.46%
		46.53 % (Jembatan)	42.28%
4	Persentase penyediaan infrastruktur air minum	85,12%	95.95%
5	Persentase penyediaan infrastruktur sanitasi	81,03%	87.68%
6	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis	96,00%	96.00%
7	Persentase penyediaan LPJU dan trotoar di wilayah perkotaan yang sesuai dengan kewenangannya	86,67%	86.87%
		15,96%	15.96%
8	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang	100,00%	100.00%

### 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021 dengan target RENSTRA tahun 2021 digambarkan dengan capaian sasaran indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dengan Target RENSTRA Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2021	% CAPAIAN	RENCANA SESUAI RENSTRA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur ke-PU-an sesuai dengan tata ruang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Persentase Infrastruktur ke-PU-an Kondisi Baik sesuai rencana tata ruang	75.71%	100.95 %	75.00%
Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air	Persentase infrastruktur SDA meningkat kualitasnya	75.00%	96.15%	78.00%
Meningkatkan kondisi mantap jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	87.23%	115.55 %	75.49%

Menurunkan kondisi rusak jalan dan jembatan kabupaten	Persentase penurunan kerusakan jalan dan jembatan kabupaten	15.46%	99.42%	15.55%
		42.28%	99.32%	42.57%
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi	Persentase penyediaan infrastruktur air minum	95.95%	95.95%	100.00%
	Persentase penyediaan infrastruktur sanitasi	87.68%	87.68%	100.00%
Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung instansi pemerintah	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis	96.00%	99.48%	96,5%
Meningkatkan ketersediaan LPJU dan Trotoar di Wilayah Perkotaan sesuai dengan kewenangannya	Persentase penyediaan LPJU dan trotoar di wilayah perkotaan yang sesuai dengan kewenangannya	86.87%	88.64%	98.00%
		15.96%	38.00%	42.00%
Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang	100.00%	100.00 %	100.00%

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021 dengan target RENSTRA tahun 2021 dari 9 indikator yang ditetapkan menghasilkan capaian sasaran indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan.

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Bahwa untuk mencapai 8 sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto telah didukung dengan 9 indikator sasaran. Dari 9 indikator yang ditetapkan menghasilkan capaian sasaran indikator kinerja:

1. Indikator Kinerja 1 : Persentase Infrastruktur ke-PU-an Kondisi Baik sesuai rencana tata ruang, capaian kinerja dari indikator ini dihitung dari Jumlah Infrastruktur ke-PU-an Kondisi Baik dibagi Jumlah Infrastruktur ke-PU-an dikali 100%, target yang telah ditetapkan sebesar 75% dan dapat tercapai

sebesar 75,71%. Pencapaian indikator ini didukung oleh 11 Program dan 19 Kegiatan.

2. Indikator Kinerja 2 : Persentase infrastruktur SDA meningkat kualitasnya, capaian kinerja dari indikator ini dihitung dari Jumlah DI/JI Meningkat kualitasnya dibagi Jumlah DI/JI yang menjadi kewenangan dikali 100% ,target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 78 % dan dapat tercapai sebesar 75 %. Pencapaian indikator ini didukung oleh 1 Program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan 2 Kegiatan yaitu Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Indikator Kinerja 3 : Persentase jalan kabupaten kondisi mantap, capaian kinerja dari indikator ini dihitung dari Jumlah Panjang Jalan Kabupaten kondisi baik dan sedang dibagi Panjang Keseluruhan Jalan Kabupaten dikali 100%, target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75,49 % dan dapat tercapai sebesar 87,23 %. Pencapaian indikator ini didukung oleh 1 Program yaitu Program Penyelenggaraan Jalan dengan 1 Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
4. Indikator Kinerja 4 : Persentase penurunan kerusakan jalan dan jembatan kabupaten, capaian kinerja dari indikator ini Jumlah jalan dan jembatan kondisi rusak ringan yang ditangani dibagi Jumlah Jalan dan Jembatan Kondisi Rusak Ringan dikali 100%. target yang telah ditetapkan untuk jalan yaitu sebesar 15,55 % dan dapat tercapai sebesar 15,46 % sedangkan untuk jembatan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 42,57 % dan dapat tercapai sebesar 42,28 %. Pencapaian indikator ini didukung oleh 1 Program yaitu Program Penyelenggaraan Jalan dengan 1 Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
5. Indikator Kinerja 5 : Persentase penyediaan infrastruktur air minum Capaian pada indicator ini dihitung dari Jumlah Infrastruktur air minum yang disediakan dibagi jumlah rencana kebutuhan infrastruktur air minum dikali 100%. target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 % dan dapat tercapai sebesar 95,95 %. Pencapaian

indikator ini didukung oleh 1 Program yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan 1 Kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

6. Indikator Kinerja 6 : Persentase penyediaan infrastruktur sanitasi, capaian kinerja dari indikator ini dihitung dari Jumlah infrastruktur sanitasi yang disediakan dibagi jumlah rencana kebutuhan infrastruktur sanitasi dikali 100%. target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 % dan dapat tercapai sebesar 87,68 %. Pencapaian indikator ini didukung oleh Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
7. Indikator Kinerja 7 : Persentase bangunan gedung instansi pemerintah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis, capaian kinerja dari indikator ini dihitung dari Jumlah Bangunan gedung instansi pemerintah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis dibagi jumlah gedung instansi pemerintah dikali 100%. target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 96,5 % dan dapat tercapai sebesar 96%. Pencapaian indikator ini didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung dengan Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
8. Indikator Kinerja 8 : Persentase penyediaan LPJU dan trotoar di wilayah perkotaan yang sesuai dengan kewenangannya, capaian kinerja dari indikator ini dihitung dari Jumlah LPJU terpasang, terpelihara dan termeterisasi dibagi rencana kebutuhan LPJU di wilayah kabupaten dikali 100% dan Jumlah trotoar wilayah perkotaan yang menjadi kewenangan terbangun dibagi Jumlah Trotoar wilayah perkotaan yang menjadi kewenangan harus dibangun dikali 100%. target yang telah ditetapkan untuk LPJU yaitu sebesar 98 % dan dapat tercapai sebesar 86,67% dan target yang telah ditetapkan untuk trotoar yaitu sebesar 42 % dan dapat tercapai sebesar 15,96 %. Pencapaian indikator ini didukung oleh Program Penyelenggaraan

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

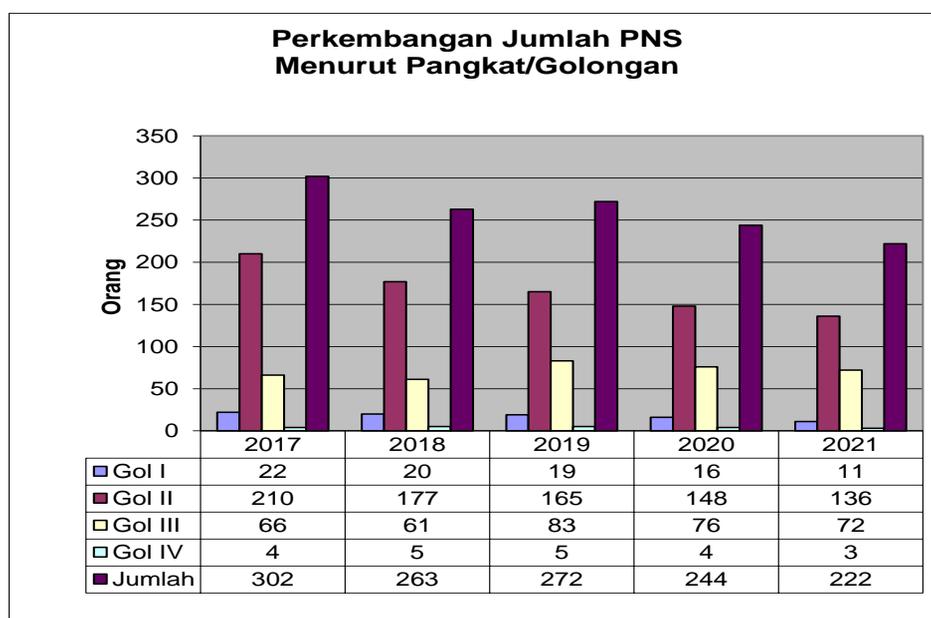
9. Indikator Kinerja 9 : Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang, capaian kinerja dari indikator ini dihitung dari Jumlah kegiatan pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dalam DPA dibagi Jumlah Indikasi Program dalam dokumen rencana tata ruang. target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 % dan dapat tercapai sebesar 100 sesuai dengan target telah ditetapkan dikarenakan pemanfaatan lahan sudah sesuai dengan tata ruang. Pencapaian indikator ini didukung Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto di dukung oleh sumber daya manusia dan sumber dana dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel Grafik Perkembangan PNS

## 2. Sumber Dana

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto telah mendapatkan anggaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 244.524.480.964,00. Anggaran tersebut telah dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan dan menjaga kondisi infrastruktur.

**TABEL ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi Anggaran	Prosentase tingkat efisiensi	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7*100%	10 = 100%-(6/9*100%)	11
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur ke-PU-an sesuai dengan tata ruang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	1 Persentase Infrastruktur ke-PU-an Kondisi Baik sesuai rencana tata ruang	75.00 %	75.71 %	100.95 %	244,445,897,630.67	197,302,162,412.22	80.71%	19.29%	
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air	2 Persentase infrastruktur SDA meningkat kualitasnya	78.00 %	75.00 %	96.15 %	10,600,749,000.00	8,640,172,682.00	81.51%	18.49%	

3	Meningkatkan kondisi mantap jalan kabupaten	3	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	75.49 %	87.23 %	115.55 %	127,500,682,218.00	108,649,005,304.68	85.21%	14.79%	
4	Menurunkan kondisi rusak jalan dan jembatan kabupaten	4	Persentase penurunan kerusakan jalan dan jembatan kabupaten	15.55 %	15.46 %	99.42 %	16,355,477,779.00	14,951,786,116.79	91.42%	8.58%	Jalan
				42.57 %	42.28 %	99.32 %					Jemba tan
5	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi	5	Persentase penyediaan infrastruktur air minum	100.00 %	95.95 %	95.95 %	6,752,430,000.00	5,475,513,241.00	81.09%	18.91%	
		6	Persentase penyediaan infrastruktur sanitasi	100.00 %	87.68 %	87.68 %	36,194,842,000.00	24,521,186,992.00	67.75%	32.25%	
6	Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung instansi pemerintah	7	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis	96,5 %	96.00 %	99.48 %	13,198,000,000.00	8,325,587,099.25	63.08%	36.92%	

7	Meningkatkan ketersediaan LPJU dan Trotoar di Wilayah Perkotaan sesuai dengan kewenangannya	8	Persentase penyediaan LPJU dan trotoar di wilayah perkotaan yang sesuai dengan kewenangannya	98.00 %	86.87 %	88.64 %	2,735,000,00 0.00	2,183,862,59 9.00	79.85%	20.15%	LPJU
				42.00 %	15.96 %	38.00 %					Trotoar
7	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang	8	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1,384,000,00 0.00	1,110,779,52 4.00	80.26%	19.74%	

**TABEL EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN SASARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Targ et	Real isasi	Capa ian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosen tase tingkat efisien si anggar an	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (100%- (10/9* 100%))	12
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur ke-PU-an sesuai dengan tata ruang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	1 Persentase Infrastruktur ke-PU-an Kondisi Baik sesuai rencana tata ruang	75.00%	75.71%	100.95%			244,445,897,630.67	197,302,162,412.22	19.29%	

<b>PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH</b>		<b>29,567,54 9,967.00</b>	<b>23,315,61 5,054.50</b>		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		632,000,00 0.00	408,833,47 8.00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		60,000,000. 00	59,157,372. 00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		494,000,00 0.00	278,626,59 0.00		

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78,000,000.00	71,049,516.00		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	25,329,737,407.00	19,784,895,048.00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,329,737,407.00	19,784,895,048.00		
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	90,000,000.00	81,192,000.00		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90,000,000.00	81,192,000.00		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1,060,000,000.00	954,557,620.00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	36,900,000.00	35,006,750.00		

Bangunan Kantor				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190,000,00 0.00	183,180,00 0.00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83,500,000. 00	82,067,260. 00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	94,500,000. 00	86,692,562. 00		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39,600,000. 00	33,691,246. 00		
Penyediaan Bahan/Material	307,500,00 0.00	303,218,30 2.00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308,000,00 0.00	230,701,50 0.00		

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah</b>	1,770,562,5 60.00	1,530,317,3 86.00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	276,000,00 0.00	201,312,97 6.00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,494,562,5 60.00	1,329,004,4 10.00		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah</b>	921,000,00 0.00	748,800,22 1.00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	449,500,00 0.00	362,838,82 4.00		

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	200,000,00 0.00	127,030,69 7.00		
Pemeliharaan Mebel	18,000,000.00	16,652,000.00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150,000,00 0.00	142,004,40 0.00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103,500,00 0.00	100,274,30 0.00		

<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>		<b>10,600,74 9,000.00</b>	<b>8,640,172, 682.00</b>		
	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota</b>	650,000,00 0.00	527,344,37 5.00		
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	491,000,00 0.00	437,002,47 5.00		

Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	159,000,00 0.00	90,341,900. 00		
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	9,950,749,0 00.00	8,112,828,3 07.00		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7,664,749,0 00.00	6,038,539,7 00.00		

	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2,286,000,000.00	2,074,288,607.00		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		<b>143,856,159,997.00</b>	<b>123,600,791,421.47</b>		
	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>143,856,159,997.00</b>	<b>123,600,791,421.47</b>		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	115,000,000.00	111,838,756.00		
	Survei Kondisi Jalan/Jembata	100,000,000.00	98,534,944.00		

	n				
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	99,746,251,218.00	86,056,863,868.25		
	Rekonstruksi Jalan	13,521,274,000.00	10,861,357,276.58		
	Pemeliharaan Berkala Jalan	8,930,237,000.00	7,084,683,636.11		
	Pembangunan Jembatan	5,087,920,000.00	4,435,726,823.74		
	Pemeliharaan Rutin Jalan	14,915,377,779.00	13,651,031,515.44		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,440,100,000.00	1,300,754,601.35		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>6,752,430,000.00</b>	<b>5,475,513,241.00</b>		

<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	6,752,430,000.00	5,475,513,241.00		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	300,000,000.00	296,720,560.00		
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	100,000,000.00	95,066,650.00		
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan	6,352,430,000.00	5,083,726,031.00		

	Perdesaan				
	<b>PROGRAM PENGEMBA NGAN SISTEM DAN PENGELOL AAN PERSAMPA HAN REGIONAL</b>	1,605,500,0 00.00	1,485,618,2 05.00		
	<b>Pengembang an Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/K ota</b>	1,605,500,0 00.00	1,485,618,2 05.00		
	Pembangun an TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS	1,605,500,0 00.00	1,485,618,2 05.00		

<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>		2,127,342,0 00.00	2,081,831,7 16.00		
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	2,127,342,0 00.00	2,081,831,7 16.00		
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2,127,342,0 00.00	2,081,831,7 16.00		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM</b>		32,462,000, 000.00	20,953,737, 071.00		

<b>DRAINASE</b>					
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	32,462,000,000.00	20,953,737,071.00		
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	21,975,000,000.00	12,065,231,514.00		
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	10,487,000,000.00	8,888,505,557.00		
<b>PROGRAM PENATAAN</b>	<b>12,711,000,000.00</b>	<b>7,964,271,557.25</b>			

<b>BANGUNAN GEDUNG</b>					
	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	12,711,000, 000.00	7,964,271,5 57.25		

		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	47,000,000.00	43,610,180.00		
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12,664,000,000.00	7,920,661,377.25		

<b>PROGRAM PENGEMBA NGAN JASA KONSTRUK SI</b>		<b>487,000,0 00.00</b>	<b>361,315,5 42.00</b>		
	<b>Penyelenggar aan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	200,000,00 0.00	193,344,78 0.00		
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	200,000,00 0.00	193,344,78 0.00		
	<b>Penyelenggar aan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/K ota</b>	287,000,00 0.00	167,970,76 2.00		

	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	150,000,00 0.00	141,933,16 2.00		
	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	137,000,00 0.00	26,037,600. 00		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>2,735,000,000.00</b>	<b>2,183,862,599.00</b>		
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2,735,000,000.00</b>	<b>2,183,862,599.00</b>		

	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta	2,735,000,0 00.00	2,183,862,5 99.00		
<b>PROGRAM PENYELEN GGARAAN PENATAAN RUANG</b>		<b>1,384,000, 000.00</b>	<b>1,110,779, 524.00</b>		
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/K ota</b>	914,000,00 0.00	784,248,90 9.00		
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan	674,000,00 0.00	578,312,14 3.00		



2	Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air	2	Persentase infrastruktur SDA meningkat kualitasnya	78.0 0%	75.0 0%	96.1 5%		10,600,74 9,000.00	8,640,172, 682.00	18.49 %
							<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	10,600,74 9,000.00	8,640,172, 682.00	
							Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	650,000,00 0.00	527,344,37 5.00	
							Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	491,000,00 0.00	437,002,47 5.00	

Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	159,000,00 0.00	90,341,900. 00		
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	9,950,749,0 00.00	8,112,828,3 07.00		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7,664,749,0 00.00	6,038,539,7 00.00		

							Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2,286,000,000.00	2,074,288,607.00		
3	Meningkatkan kondisi mantap jalan kabupaten	3	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	75.49%	87.23%	115.55%		127,500,682,218.00	108,649,005,304.68	14.79%	
							<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	127,500,682,218.00	108,649,005,304.68		
							<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	127,500,682,218.00	108,649,005,304.68		
							Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	115,000,000.00	111,838,756.00		

							Jembatan				
							Survei Kondisi Jalan/Jembatan	100,000,00 0.00	98,534,944. 00		
							Pelebaran Jalan Menuju Standar	99,746,251, 218.00	86,056,863, 868.25		
							Rekonstruksi Jalan	13,521,274, 000.00	10,861,357, 276.58		
							Pemeliharaan Berkala Jalan	8,930,237,0 00.00	7,084,683,6 36.11		
							Pembangunan Jembatan	5,087,920,0 00.00	4,435,726,8 23.74		
4	<b>Menurunkan kondisi rusak jalan dan jembatan kabupaten</b>	4	<b>Persentase penurunan kerusakan jalan dan jembatan kabupaten</b>	<b>15.5 5%</b>	<b>15.4 6%</b>	<b>99.4 2%</b>		<b>16,355,47 7,779.00</b>	<b>14,951,78 6,116.79</b>	<b>8.58%</b>	Jalan

			42.5 7%	42.2 8%	99.3 2%					Jemb atan
						<b>PROGRAM PENYELEN GGARAAN JALAN</b>		<b>16,355,47 7,779.00</b>	<b>14,951,78 6,116.79</b>	
							<b>Penyelenggar aan Jalan Kabupaten/K ota</b>	16,355,477, 779.00	14,951,786, 116.79	
							Pemeliharaa n Rutin Jalan	14,915,377, 779.00	13,651,031, 515.44	
							Pemeliharaa n Rutin Jembatan	1,440,100,0 00.00	1,300,754,6 01.35	
5	<b>Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi</b>	5	<b>Persentase penyediaan infrastruktur air minum</b>	<b>100. 00%</b>	<b>95.9 5%</b>	<b>95.9 5%</b>		<b>6,752,430, 000.00</b>	<b>5,475,513, 241.00</b>	<b>18.91 %</b>
						<b>PROGRAM PENGELOL AAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIA</b>		<b>6,752,430, 000.00</b>	<b>5,475,513, 241.00</b>	

	<b>AN AIR MINUM</b>				
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	6,752,430,000.00	5,475,513,241.00		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	300,000,000.00	296,720,560.00		
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan	100,000,000.00	95,066,650.00		

						Kelompok Masyarakat				
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6,352,430,000.00	5,083,726,031.00		
<b>6</b>	<b>Persentase penyediaan infrastruktur sanitasi</b>	<b>100.00%</b>	<b>87.68%</b>	<b>87.68%</b>			<b>36,194,842,000.00</b>	<b>24,521,186,992.00</b>	<b>32.25%</b>	
					<b>PROGRAM PENGEMBA NGAN SISTEM DAN PENGELOL AAN PERSAMPA HAN REGIONAL</b>		1,605,500,000.00	1,485,618,205.00		

		<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	1,605,500,000.00	1,485,618,205.00		
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1,605,500,000.00	1,485,618,205.00		
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	2,127,342,000.00	2,081,831,716.00		
		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	2,127,342,000.00	2,081,831,716.00		

		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2,127,342,000.00	2,081,831,716.00		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>		32,462,000,000.00	20,953,737,071.00		
		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	32,462,000,000.00	20,953,737,071.00		
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	21,975,000,000.00	12,065,231,514.00		

							Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	10,487,000,000.00	8,888,505,557.00		
6	Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung instansi pemerintah	7	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis	96,5 %	96.0 0%	99.4 8%		13,198,000,000.00	8,325,587,099.25	36.92 %	
							<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>12,711,000,000.00</b>	<b>7,964,271,557.25</b>		



	(TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12,664,000, 000.00	7,920,661,3 77.25		
	<b>PROGRAM PENGEMBA NGAN JASA KONSTRUK SI</b>	<b>487,000,0 00.00</b>	<b>361,315,5 42.00</b>		

<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	200,000,00 0.00	193,344,78 0.00		
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	200,000,00 0.00	193,344,78 0.00		
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	287,000,00 0.00	167,970,76 2.00		
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	150,000,00 0.00	141,933,16 2.00		

							Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	137,000,000.00	26,037,600.00		
7	Meningkatkan ketersediaan LPJU dan Trotoar di Wilayah Perkotaan sesuai dengan kewenangannya	8	Persentase penyediaan LPJU dan trotoar di wilayah perkotaan yang sesuai dengan kewenangannya	98.00%	86.87%	88.64%		2,735,000,000.00	2,183,862,599.00	20.15%	LPJU
				42.00%	15.96%	38.00%					Trotoar
							PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2,735,000,000.00	2,183,862,599.00		

							<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota</b>	2,735,000,0 00.00	2,183,862,5 99.00		
							Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta	2,735,000,0 00.00	2,183,862,5 99.00		
8	<b>Mempertahank an kesesuaian pembangunan/ peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang</b>	9	<b>Persentase kesesuaian pembangunan/ peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dengan rencana tata ruang</b>	<b>100. 00%</b>	<b>100. 00%</b>	<b>100. 00%</b>		<b>1,384,000, 000.00</b>	<b>1,110,779, 524.00</b>	<b>19.74 %</b>	
							<b>PROGRAM PENYELEN GGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1,384,000, 000.00</b>	<b>1,110,779, 524.00</b>		



			<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	470,000,00 0.00	326,530,61 5.00		
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	470,000,00 0.00	326,530,61 5.00		

**6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK )**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO**  
**TAHUN 2021**

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PROSENTASE RENC. TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENC.TK.CAPAIAN (TARGET)			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>Persentase pelayanan kesekretariatan terlaksana</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	-
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Nilai</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>100%</b>	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Dokumen	3	3	100%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	Bulan	12	12	100%	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja yang tersusun	Dokumen	1	1	100%	-

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN terbayar Gaji dan Tunjangannya</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1	100%	-
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aset OPD yang tercatat dan dilaporkan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan Aset OPD	Dokumen	1	1	100%	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	5	5	100%	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	10	10	100%	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	Dos	5000	5000	100%	-

		dan Tamu yang Disediakan					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	14	14	100%	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan per bulan	Bulan	12	12	100%	-
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	Jenis	44	44	100%	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar dan Dalam Daerah yang Terbiayai	Oh	600	600	100%	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon, Internet, Listrik Terbayar per Bulan	Bulan	12	12	100%	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 Tenaga Kerja yang Terbayar Gajinya per Bulan	Bulan/Org	13/72	12	92%	-

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	Unit	20	20	100%	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Berat yang Dipelihara	Unit	10	10	100%	-
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang Dipelihara	Buah	70	70	100%	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara	Jumlah	3	3	100%	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kali	230	230	100%	-
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		<b>Persentase jalan kabupaten kondisi mantap</b>	%	<b>65</b>	<b>87.23</b>	<b>134%</b>	-

	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jalan kabupaten terbangun</b>	%	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	1. Pelaksanaan kegiatan melebihi tanggal kontrak 2. Terdapat temuan kekurangan volume kegiatan 3. Terdapat temuan kerusakan pada hasil pekerjaan
		<b>Persentase jalan dan jembatan yang terpelihara</b>	%	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	Waktu pelaksanaan mepet dan musim hujan
		<b>Persentase alat-alat penunjang ke-PU-an yang siap digunakan</b>	%	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>	-
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	2	2	100%	-
	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	1	1	100%	-
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah dan panjang ruas jalan yang dilebarkan	Jalan	24	23	96%	1. Pelaksanaan kegiatan melebihi tanggal kontrak 2. Terdapat temuan kekurangan

							volume kegiatan 3. Terdapat temuan kerusakan pada hasil pekerjaan
	Rekonstruksi Jalan	Jumlah dan panjang ruas jalan yang direkonstruksi	Jalan	6	5	83%	1. Pelaksanaan kegiatan melebihi tanggal kontrak 2. Terdapat temuan kekurangan volume kegiatan 3. Terdapat temuan kerusakan pada hasil pekerjaan
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah dan panjang ruas jalan yang dipelihara berkala	Jalan	3	3	100%	1. Pelaksanaan kegiatan melebihi tanggal kontrak 2. Terdapat temuan kekurangan volume kegiatan 3. Terdapat temuan kerusakan pada hasil pekerjaan
	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Jembatan	2	2	100%	-
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang / Luas ruas jalan kondisi rusak ringan yang	Km	60	58	97%	Waktu pelaksanaan mepet dan musim hujan

		terpelihara					
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan kondisi rusak ringan yang terpelihara	Jembatan	10	10	100%	Waktu pelaksanaan mepet dan musim hujan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>		<b>Persentase infrastruktur SDA kondisi baik</b>	%	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>	-
	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SDA terkelola</b>	%	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>	-
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah waduk yang terpelihara	Waduk	5	Normalisasi Sungai sepanjang 10.97 km	-	Kendala Cuaca, Lokasi usulan masih tergenang air
	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan aset sumber daya air yang tersusun	Dokumen	2	2	100%	Proses perda yang baru memerlukan waktu
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase JI kondisi baik</b>	%	<b>75</b>	<b>43</b>	<b>57%</b>	- Keterbatasan anggaran - Kendala Cuaca
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Volume JI yang direhabilitasi	JI	46	7	15%	- Keterbatasan anggaran - Kendala Cuaca

	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi terpelihara	Jl	10	4	40%	- Keterbatasan anggaran - Kendala Cuaca
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		<b>Persentase SPAM terbangun</b>	%	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	-
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SPAM terbangun</b>	%	<b>7</b>	<b>6.75</b>	<b>96%</b>	-
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	6	6	100%	1. Kurang tersedianya data base air minum 2. Minimnya data eksisting perpipaan air minum di tiap desa 3. Perlu adanya update capaian akses air minum 4. Sedikit susah koordinasi dengan pihak desa
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	Kali	10	10	100%	Program dari pusat yang memerlukan BOP dari APBD terkadang turun tengah tahun,

							sehingga BOP sulit menyesuaikan
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	SR	1950	1600	82%	1. Medan pemasangan pipa banyak yang tanah keras 2. Terkendala tahap saluran DAK, sehingga sebagian paket harus dibayar APBD 3. Sektor air minum masih belum menjadi prioritas anggaran daerah
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>		<b>Persentase Sarana Persampahan Terbangun</b>	%	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	-
	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana persampahan tersedia</b>	%	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	-
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Volume sampah yang dapat ditampung per hari	m3/hari	136	136	100%	1. Sektor persampahan belum mejadi prioritas

							pembangunan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>		<b>Persentase Sarana Air Limbah Terbangun</b>	%	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>100%</b>	-
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase air limbah domestik terkelola</b>	%	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>100%</b>	-
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah tangki septik individu dibangun	Unit	200	264	132%	1. Penandaan pembuangan sanitasi termasuk air limbah masih mengandalkan dana dari pusat sehingga capaian masih rendah 2. Belum berfungsinya kembali limbah domestik masih belum ada penanganan hingga akhir pengelolaan 3, Adanya IPLT merupakan salah satu syarat untuk pengajuan DAK sanitasi

<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>		<b>Persentase panjang Drainase Lingkungan terbangun</b>	%	42	42	100%	-
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase drainase terhubung dengan sungai</b>	%	45	45	100%	-
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase dibangun	M	4709	2585	55%	1. Saluran drainase banyak yang rusak sehingga menimbulkan genangan dan banjir pada wilayah tersebut 2. Berfungsinya saluran tersier pada wilayah-wilayah tersebut
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase dibangun	M	4709	3991	85%	1. Banyaknya saluran sekunder dan tersier yang rusak dan tidak berfungsi 2. Penumpukan sampah-sampah pada saluran dan sedimentasi

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		<b>Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	-
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase dokumen Rencana Tata Ruang tersedia</b>	%	<b>38.89</b>	<b>38.89</b>	<b>100%</b>	-
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen materi teknis disusun	Dokumen	6	6	100%	1. Terhambatnya koordinasi dengan BIG 2. Terbatasnya koordinasi dengan Tim Pelaksanaan Swakelola dikarenakan pembatasan beraktivitas dimasa pandemi
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang terlaksana	Kebijakan	10	10	100%	1. Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisai banyak tertunda pada saat pandemi 2. Informasi terkait tata ruang masih belum banyak diketahui Pemerintah Desa

							3. Banyaknya usulan perubahan alih fungsi lahan pada saat kegiatan sosialisai 4. Sistem Informasi Penataan Ruang Pemerintah (SIPR) Kabupaten belum banyak
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemanfaatan ruang daerah sesuai rencana tata ruang</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	-
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Bulan yang tercukupi fasilitasi dan koordinasi penataan ruang	Bulan	12	12	100%	-
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik</b>	%	<b>96.5</b>	<b>96.5</b>	<b>100%</b>	Permasalahan pada waktu lelang pembangunan rumah aman ada kendala administrasi penyedia barang/jasa tidak sesuai dg yg dipersyaratkan sehingga penyedia

							barang/jasa dinyatakan gugur.
	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Persentase Bangunan Gedung lengkap persyaratan administrasi dan teknis</b>	%	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	-
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Tim Terbentuk dan tercukupi operasionalnya	tim/Bulan	4	1	25%	-
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket kegiatan	paket Kegiatan	37	2	5%	Permasalahan pada waktu lelang pembangunan rumah aman ada kendala administrasi penyedia barang/jasa tidak sesuai dg yg dipersyaratkan sehingga penyedia

							barang/jasa dinyatakan gugur.
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>		-	-	-	-	-	Ada sub kegiatan yang tidak bisa terserap
	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Persentase tenaga terampil konstruksi bersertifikat</b>	%	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	-
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil bersertifikat	org/Ketrampilan	50	50	100%	-
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase badan usaha jasa konstruksi terdata statusnya</b>	%	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>	
	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah pelatihan diselenggarakan	kali	8	8	100%	-
	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha disusun	Dokumen	1	1	100%	ada perubahan nomorklatur, sehingga ada sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>		<b>Persentase LPJU Terpasang</b>	%	-	-	-	-

<b>(LLA)</b>							
		<b>Persentase LPJU Terpelihara</b>	%	7	7	100%	-
		<b>Persentase trotoar wilayah perkotaan yang menjadi kewenangannya terbangun</b>	%	25	25	100%	-
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jalan kabupaten tersedia perlengkapan jalan</b>	%	98	86.87	89%	-
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	Jumlah perlengkapan jalan	1	1	100%	-

## B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mencapai kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 244.524.480.964,00 dengan rincian :

1. Belanja Operasi : Rp. 22.472.530.850,00

Terdiri atas :

1. Belanja Pegawai : Rp. 27.589.851.645,00

2. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 40.844.562.629

3. Belanja Hibah : Rp. 8.876.154.850,00

2. Belanja Modal : Rp. 167.213.911.840,00

Terdiri atas :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 1.413.175.601,00

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 11.629.980.329,00

3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi : Rp. 154.169.355.910,00

4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp. 1.400.000,00

Realisasi anggaran sebesar Rp. 197.366.489.311,72 atau dengan persentase penyerapan sebesar 80,71 %.

Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dimaksud terinci pada tabel berikut :

**Tabel Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021**

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	Sisa Dana	% Keuangan
1	2	3	4	5	6 = $(4/3) \times 100$
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>29,803,299,967</b>	<b>23,508,595,753</b>	<b>6,294,704,214</b>	<b>79</b>
<i>1</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>632,000,000</i>	<i>408,833,478</i>	<i>223,166,522</i>	<i>65</i>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,000,000	59,157,372	842,628	99

1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	494,000,000	278,626,590	215,373,410	56
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78,000,000	71,049,516	6,950,484	91
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>25,329,737,407</b>	<b>19,784,895,048</b>	<b>5,544,842,359</b>	<b>78</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,329,737,407	19,784,895,048	5,544,842,359	78
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>90,000,000</b>	<b>81,192,000</b>	<b>8,808,000</b>	<b>90</b>
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90,000,000	81,192,000	8,808,000	90
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,060,000,000</b>	<b>954,557,620</b>	<b>105,442,380</b>	<b>90</b>
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36,900,000	35,006,750	1,893,250	95
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190,000,000	183,180,000	6,820,000	96
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83,500,000	82,067,260	1,432,740	98
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	94,500,000	86,692,562	7,807,438	92
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39,600,000	33,691,246	5,908,754	85
4.6	Penyediaan Bahan/Material	307,500,000	303,218,302	4,281,698	99
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308,000,000	230,701,500	77,298,500	75
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,770,562,560</b>	<b>1,530,317,386</b>	<b>240,245,174</b>	<b>86</b>
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	276,000,000	201,312,976	74,687,024	73

	dan Listrik				
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,494,562,560	1,329,004,410	165,558,150	89
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>921,000,000</b>	<b>748,800,221</b>	<b>172,199,779</b>	<b>81</b>
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	449,500,000	362,838,824	86,661,176	81
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	200,000,000	127,030,697	72,969,303	64
6.3	Pemeliharaan Mebel	18,000,000	16,652,000	1,348,000	93
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150,000,000	142,004,400	7,995,600	95
6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103,500,000	100,274,300	3,225,700	97
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>143,856,159,997</b>	<b>123,600,791,421</b>	<b>20,255,368,576</b>	<b>86</b>
7	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>143,856,159,997</b>	<b>123,600,791,421</b>	<b>20,255,368,576</b>	<b>86</b>

7.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	115,000,000	111,838,756	3,161,244	97
7.2	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	100,000,000	98,534,944	1,465,056	99
7.3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	99,746,251,218	86,056,863,868	13,689,387,350	86
7.4	Rekonstruksi Jalan	13,521,274,000	10,861,357,277	2,659,916,723	80
7.5	Pemeliharaan Berkala Jalan	8,930,237,000	7,084,683,636	1,845,553,364	79
7.6	Pembangunan Jembatan	5,087,920,000	4,435,726,824	652,193,176	87
7.7	Pemeliharaan Rutin Jalan	14,915,377,779	13,651,031,515	1,264,346,264	92
7.7	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,440,100,000	1,300,754,601	139,345,399	90
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>10,600,749,000</b>	<b>8,640,172,682</b>	<b>1,960,576,318</b>	<b>82</b>
8	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<b>650,000,000</b>	<b>527,344,375</b>	<b>122,655,625</b>	<b>81</b>
8.1	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	491,000,000	437,002,475	53,997,525	89
8.2	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	159,000,000	90,341,900	68,658,100	57
9	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)</i>	<b>9,950,749,000</b>	<b>8,112,828,307</b>	<b>1,837,920,693</b>	<b>82</b>

	<i>Daerah Kabupaten/Kota</i>				
9.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7,664,749,000	6,038,539,700	1,626,209,300	79
9.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2,286,000,000	2,074,288,607	211,711,393	91
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>6,752,430,000</b>	<b>5,475,513,241</b>	<b>1,276,916,759</b>	<b>81</b>
10	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>6,752,430,000</i>	<i>5,475,513,241</i>	<i>1,276,916,759</i>	<i>81</i>
10.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	300,000,000	296,720,560	3,279,440	99
10.2	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	100,000,000	95,066,650	4,933,350	95
10.3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6,352,430,000	5,083,726,031	1,268,703,969	80
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>1,605,500,000</b>	<b>1,485,618,205</b>	<b>119,881,795</b>	<b>93</b>
11	<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1,605,500,000</i>	<i>1,485,618,205</i>	<i>119,881,795</i>	<i>93</i>

11.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1,605,500,000	1,485,618,205	119,881,795	93
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>2,127,342,000</b>	<b>2,081,831,716</b>	<b>45,510,284</b>	<b>98</b>
12	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>2,127,342,000</i>	<i>2,081,831,716</i>	<i>45,510,284</i>	<i>98</i>
12.1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2,127,342,000	2,081,831,716	45,510,284	98
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>32,462,000,000</b>	<b>20,953,737,071</b>	<b>11,508,262,929</b>	<b>65</b>
13	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>32,462,000,000</i>	<i>20,953,737,071</i>	<i>11,508,262,929</i>	<i>65</i>
13.1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	21,975,000,000	12,065,231,514	9,909,768,486	55
13.2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	10,487,000,000	8,888,505,557	1,598,494,443	85
<b>VII I</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1,384,000,000</b>	<b>1,110,779,524</b>	<b>273,220,476</b>	<b>80</b>
14	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	<i>914,000,000</i>	<i>784,248,909</i>	<i>129,751,091</i>	<i>86</i>

14.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	674,000,000	578,312,143	95,687,857	86
14.2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	240,000,000	205,936,766	34,063,234	86
15	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>470,000,000</b>	<b>326,530,615</b>	<b>143,469,385</b>	<b>69</b>
15.1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	470,000,000	326,530,615	143,469,385	69
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>12,711,000,000</b>	<b>7,964,271,557</b>	<b>4,746,728,443</b>	<b>63</b>
16	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>12,711,000,000</b>	<b>7,964,271,557</b>	<b>4,746,728,443</b>	<b>63</b>
16.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	47,000,000	43,610,180	3,389,820	93

16. 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12,664,000,000	7,920,661,377	4,743,338,623	63
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>487,000,000</b>	<b>361,315,542</b>	<b>125,684,458</b>	<b>74</b>
17	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	<i>200,000,000</i>	<i>193,344,780</i>	<i>6,655,220</i>	<i>97</i>
17. 1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	200,000,000	193,344,780	6,655,220	97
18	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>287,000,000</i>	<i>167,970,762</i>	<i>119,029,238</i>	<i>59</i>
18. 1	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	150,000,000	141,933,162	8,066,838	95
18. 2	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	137,000,000	26,037,600	110,962,400	19
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>2,735,000,000</b>	<b>2,183,862,599</b>	<b>551,137,401</b>	<b>80</b>
19	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>2,735,000,000</i>	<i>2,183,862,599</i>	<i>551,137,401</i>	<i>80</i>

19. 1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2,735,000,000	2,183,862,599	551,137,401	80
<b>TOTAL</b>		<b>244,524,480,9 64.00</b>	<b>197,366,489,3 11.72</b>	<b>47,157,991,6 52.28</b>	<b>80.71</b>

### C. Data Prestasi yang diperoleh pada tahun 2021

Pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto tidak memiliki capaian prestasi, capaian prestasi terakhir pada tahun 2018 adalah Juara Harapan I Lomba Petugas O & P Irigasi Teladan Tahun 2018 Tingkat Juru Pengairan Provinsi Jawa Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan/diemban oleh setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai sebagai media pendorong terwujudnya *Good Governance*.

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebagai media pertanggungjawaban berisi informasi mengenai kinerja dinas dan bermanfaat untuk menjadikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi agar lebih efektif, berhasil guna dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dalam tahun 2021 telah menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan sasaran-sasaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto telah berusaha untuk mendapatkan keberhasilan capaian yang maksimal. Pada Tahun 2021 alokasi belanja seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto bersumber dari APBD Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 244.524.480.964,00 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 77.310.569.124,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 167.213.911.840,00. Dari alokasi belanja seluruh kegiatan tersebut, anggaran yang terserap sebesar Rp. 197.366.489.311,72 atau 80,71 % dari total anggaran SKPD.

Keberhasilan pencapaian sasaran yang ada tidak terlepas dari berkat dukungan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dan kerjasama dengan pihak ketiga (swasta) dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

Namun tidak dipungkiri masih ada beberapa sasaran yang mungkin dapat dikatakan kurang tercapai, yang dikarenakan disamping terbatasnya sarana dan

prasarana pendukung yang ada, juga adanya faktor eksternal yang diluar jangkauan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sebagai upaya dalam rangka meminimalisir kendala yang ada, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto terus berupaya mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan menjalin koordinasi dengan instansi yang terkait dalam upaya menangani permasalahan-permasalahan yang ada.

Mojokerto, Februari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO



**RINALDI RIZAL SABIRIN, ST., M.BA.**

Pembina

NIP. 19791010 200901 1 011

Lampiran :

Daftar Paket Pekerjaan Tahun 2021 pendukung capaian kinerja organisasi tahun 2021:

<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>				
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Nama Pekerjaan</b>	<b>Nilai Kontrak</b>	<b>Volume</b>
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi - Konstruksi - DAK Fisik - Rehabilitasi Daerah Irigasi Jatisari	623.291.000	Bendung 1 buah
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi - Konstruksi - DAK Fisik - Rehabilitasi Daerah Irigasi Balongkenongo	466.125.000	Saluran sekunder 85 m Bendung 1 buah
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi - Konstruksi - DAK Fisik - Rehabilitasi Daerah Irigasi Janjing	447.951.000	Bangunan sadap 1 buah
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi - Konstruksi - DAK Fisik - Rehabilitasi Daerah Irigasi Mojosongo Bawah	567.808.000	Saluran sekunder 355 m
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi - Konstruksi - DAK Fisik - Rehabilitasi Daerah Irigasi Kedungpeluk	371.374.000	Saluran sekunder 467 m
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi - Konstruksi - DAK Fisik - Rehabilitasi Daerah Irigasi Mojojejer	596.877.000	Saluran sekunder 670 m

7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi (Belanja Pemeliharaan DI Kabupaten Mojokerto) - (WISMP I)	70.000.000	Saluran sekunder 128 m
SUB TOTAL I			3.143.426.000	
8	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi - Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Pandan.	181.300.000	Saluran sekunder 200 m
9	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi - Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Bangsal.	181.750.000	Saluran sekunder 200 m
10	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi - Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Sumengko.	174.190.100	Saluran sekunder 200 m
11	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi - Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Pugeran.	175.293.700	Saluran sekunder 200 m
12	Operasi dan Pemeliharaan	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air	491.000.000	Normalisasi sungai 10.975

	<b>Embung dan Penampung Air Lainnya</b>	<b>Lainnya</b>		
<b>SUB TOTAL I</b>			<b>1.203.533.800</b>	
<b>TOTAL I + II</b>			<b>4.346.959.800</b>	

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
NO.	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	VOLUME (m)		KONSTRUKSI	KETERANGAN
				Panjang (m)	Lebar		
1	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Gumeng - Kemasantani	2.797.031.000,00	581,85	5.50 m	Jalan Beton	JALAN ASET KABUPATEN
2		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Legundi - Rejosari	2.806.050.000,00	997	5.50 m	Jalan Beton	
3		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Kota Mojokerto - Keprabon	2.200.582.000,00	404,00	7.00 m	Jalan Beton	
4		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Mojowiryo - Mojosarirejo	3.067.917.000,00	1.081,00	5.50 m	Jalan Beton	
5		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Jatirowo - Cinandang	2.554.909.000,00	572,46	5.50 m	Jalan Beton	
6		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Kertosari -	2.642.660.000,00	1.088,00	5.50 m	Jalan Beton	

		Simbaringin					
7		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Centong - Candiwatu	2.690.134.000,00	781,00	5.50 m	Jalan Beton	
8		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Ngastemi - Kepuhpandak	2.787.139.000,00	1.148,00	5.50 m	Jalan Beton	
9		Belanja Modal Jalan Kabupaten - KEGIATAN DAK - Ruas Jalan Pagerluyung - Canggu (DAK)	5.958.149.000,00	1.903,00	6.00 m	Jalan Beton	
10		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Puri - Tawar	2.682.933.000,00	783,00	6.00 - 8.00 m	Jalan Beton	
11		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Temuireng - Gunungan	4.094.395.000,00	1.426,00	5.50 m	Jalan Beton	
12		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Bendung - Jetis	3.540.027.000,00	625,50	5.50 m	Jalan Beton	

NO.	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	VOLUME (m)		KONSTRUKSI	KETERANGAN
				Panjang (m)	Lebar		
13	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Pesanggrahan - Mojorejo	3.405.616.000,00	1.418,00	5.50 m	Jalan Beton	JALAN ASET KABUPATEN
14		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Tribuana Tungga Dewi - Belahan Tengah	3.054.508.000,00	1.225,00	6.00 m	Jalan Beton	
15		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja	3.038.522.000,00		6.00	Jalan Beton	

		Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Gembongan - Jerukseger		1.004,00	m		
16		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Kembangbelor - Claket	3.801.396.000,00	526,00	7.00 m	Jalan Beton	
17		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Sekargadung - Purwojati	3.282.637.000,00	1.054,00	5.50 m	Jalan Beton	
18		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Pasinan - Pohkecik	4.783.082.000,00	1.447,00	6.00 m	Jalan Beton	
19		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Mojowatesrejo - Mojodowo	5.432.733.000,00	2.075,00	5.50 m	Jalan Beton	
20		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Puloniti - Sumberkarang	4.865.785.000,00	1.428,00	6.00 m	Jalan Beton	
21		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Kepuhanyar - Jatikulon	5.894.529.000,00	2.290,50	6.00 m	Jalan Beton	
22		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Sedati - Kembangsri	3.620.795.000,00	1.293,00	5.50 m	Jalan Beton	
23		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Pelebaran Jalan - Ruas Jalan Swideng-Pakis	828.688.000,00	274,40	8.00 m	Jalan Beton	
<b>SUB TOTAL I</b>			<b>70.991.868.000,00</b>	<b>25.425,71</b>			

NO.	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	VOLUME (m)		KONSTRUKSI	KETERANGAN
				Panjang (m)	Lebar		
24	Rekonstruksi Jalan	Belanja Modal Jalan Kabupaten - Rekonstruksi Jalan - Ruas Jalan Sawahan - Pasar Pertiwi	847.122.000,00	518,84	3.00 - 5.00 m	Jalan Beton	JALAN ASET KABUPATEN
25		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Rekonstruksi Jalan - Ruas Jalan Dowo - Keprabon	1.771.088.000,00	1.007,00	5.00 m	Jalan Aspal	
26		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Rekonstruksi Jalan - Ruas Jalan Watukenongo - Ngrame	2.189.790.000,00	1.014,00	4.50 m	Jalan Aspal	
27		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Rekonstruksi Jalan - Ruas Jalan Kepuhanyar - Bangsal	2.494.201.000,00	716,00	7.00 m	Jalan Beton	
28		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Rekonstruksi Jalan - Ruas Jalan Medali - Kintelan	2.716.777.000,00	1.544,00	5.00 m	Jalan Aspal	
<b>SUB TOTAL II</b>			<b>10.018.978.000,00</b>	<b>4.799,84</b>			
29	Pemeliharaan Berkala Jalan	Belanja Modal Jalan Kabupaten - Pemeliharaan Berkala Jalan - Ruas Jalan Bangsal - Ngarjo	1.399.908.000,00	1.628,50	3.00 m	Jalan Aspal	JALAN ASET KABUPATEN
30		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Pemeliharaan Berkala Jalan - Ruas Jalan Kalang - Pohjejer	972.400.000,00	1.572,00	3.00 m	Jalan Aspal	
31		Belanja Modal Jalan Kabupaten - Pemeliharaan Berkala Jalan - Ruas Jalan Nogosari - Jatijejer	1.629.826.000,00	2.233,00	3.00 m	Jalan Aspal	

<b>SUB TOTAL III</b>			<b>4.002.134.000,00</b>	<b>5.433,50</b>			
32	Pembangunan Jembatan	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten - Belanja Konstruksi Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal - Jembatan Mojokusumo	1.353.644.000,00	8,00	6.00 m	Jembatan Beton Komposit	JEMBATAN ASET KABUPATEN
33		Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten - Belanja Konstruksi Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal - Jembatan Penompo	2.758.111.000,00	27,00	5.00 m	Jembatan Balok Girder	JEMBATAN ASET DESA
<b>SUB TOTAL IV</b>			<b>4.111.755.000,00</b>	<b>35,00</b>			
<b>TOTAL I - IV</b>			<b>89.124.735.000,00</b>	<b>35.694,05</b>			

NO		PEKERJAAN	Desa	NILAI KONTRAK	VOLUME	KETERANGAN
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Ds. Kemasantani Kec. Gondang Kab. Mojokerto (DAK)	Ds. Kemasantani Kec. Gondang	629.003.000,00	Tandon : 1 unit, Pipa Distribusi : 5427 m, SR : 200 unit	
2		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Ds. Lebakjabung Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto (DAK APBN)	Ds. Lebakjabung Kec. Jatirejo	568.314.000,00	Tandon : 1 unit, Pipa Distribusi : 4.385 m, SR : 150 unit	
3		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Ds. Wonosari Kec. Ngoro Kab. Mojokerto (DAK)	Ds. Wonosari Kec. Ngoro	557.191.000,00	Pipa Distribusi : 5379 m, SR : 200 unit	

4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Ds. Bandarasri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto (DAK)	Ds. Bandarasri Kec. Ngoro	577.923.000,00	Pipa Distribusi : 5744 m, SR : 200 unit	
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Ds. Kesiman Kec. Trawas Kab. Mojokerto (DAK)	Ds. Kesiman Kec. Trawas	526.765.000,00	Tandon : 1 unit, Pipa Distribusi : 3030 m , SR : 300 unit	
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Ds. Tanjangrono Kec. Ngoro Kab. Mojokerto (DAK)	Ds. Tanjanganro Kec. Ngoro	525.236.000,00	Tandon : 1 unit, Distribusi : 2118.6 m , SR : 200 unit	
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Ds. Claket Kec. Pacet Kab. Mojokerto (DAK)	Ds. Claket Kec. Pacet	437.488.000,00	Tandon : 1 unit, Pipa Distribusi :2571 m , SR : 200 unit	
8	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Ds. Tamiajeng Kec. Trawas Kab. Mojokerto (DAK)	Ds. Tamiajeng Kec. Trawas	307.526.000,00	Tandon : 1 unit, Pipa Distribusi : 1326 m , SR : 150 unit	
9	Belanja Hibah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) Desa Rejosari Kec. Jatirejo	Desa Rejosari Kec. Jatirejo	245.000.000,00	Tandon : 1 unit, Pipa Distribusi : 1.295 m	
10	Belanja Hibah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) Desa Jembul Kec. Jatirejo	Desa Jembul Kec. Jatirejo	245.000.000,00	Tandon : 1 unit, Pipa Distribusi : 2.826 m	
SUB TOTAL I			4.619.446.000,00		

NO		PEKERJAAN	Desa	NILAI KONTRAK	VOLUME	KETERANGAN
11	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Belanja Modal Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan Pedestrian Jl. RA Basoeni	Desa Sooko Kec. Sooko	7.723.785.000,00	Panjang saluran 697 m	
12		Belanja Modal Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pemuda	Desa Randubango Kec Mojosari dan Desa Ngrame Kec. Pungging	7.751.343.000,00	Panjang saluran 1.179 m	
SUB TOTAL II				15.475.128.000,00		
13	Pembangunan Sistem drainase Lingkungan	Belanja Modal Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Dan Lingkungan Pembangunan Saluran Drainase Desa Parengan - Desa Jetis (Ruas Jetis - Jatikurung)	Desa Jetis Kec. Jetis	7.962.967.000,00	Panjang saluran 1080 m	
14		Belanja Modal Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Saluran Drainase Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo	Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo	168.981.000,00	Panjang saluran 115,2 m	
15		Belanja Modal Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Saluran Drainase Ds. Mojolebak Kec. Jetis	Ds. Mojolebak Kec. Jetis	169.780.000,00	Panjang saluran 79,2 m	
16		Belanja Modal Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Saluran Drainase Ds. Kembangringgit Kec. Pungging	Ds. Kembangringgit Kec. Pungging	169.245.000,00	Panjang saluran 216 m	
SUB TOTAL III				8.470.973.000,00		

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
NO	Sub Kegiatan	PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	VOLUME	KETERANGAN
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan PPIP (Pusat Informasi Perdagangan)	2,2 M	1 Gedung	
		Pembangunan Fasum Rumah Dinas Wabup	3,7 M	1 Fasum	
<b>TOTAL</b>			<b>5.971.619.488</b>		-



